

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Strategi Pengelolaan Program KOTAKU di Kota Jambi

3.1.1. Perencanaan (Planing)

Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta membuat dan menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa depan dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Artinya, perencanaan mencakup proses analisis terhadap data dan informasi yang relevan, memperkirakan kondisi di masa depan, serta merancang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tertentu.

Program KOTAKU bertujuan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan melalui peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan. Salah satu tujuan yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha
2. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota untuk menangani Kawasan kumuh.
3. Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat kota/kabupaten dan Tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

4. Meningkatkan penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan program peningkatan penghidupan masyarakat yang membantu mengurangi dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh.
5. Untuk mengubah masyarakat menjadi lebih bersih dan sehat dan mencegah kumuh, aturan bersama dibuat.

Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM N) 2015–2019, pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%, diukur melalui pembuatan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program. Pencapaian tujuan program dan tujuan antara diukur dengan menggunakan indikator "outcome" sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan.
 2. Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik.
 3. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di Tingkat kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU.
 4. Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh.
 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh.
- (Pedoman Umum Program KOTAKU)

Perencanaan membantu mengarahkan kegiatan masyarakat dalam organisasi, termasuk penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Program KOTAKU ini harus berhasil dengan dukungan semua pihak dan lingkungan. Setiap program dibuat tidak terlepas dari kondisi dan tujuan wilayah permukiman itu sendiri; karena itu, untuk mencapai tujuan tertentu, ada target untuk kegiatan yang dilakukan. Perencanaan adalah penentuan secara matang dan cerdas apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari perencanaan yang dilakukan adalah untuk membuat pelaksanaan program KOTAKU lebih mudah.

Program KOTAKU merencanakan untuk mengumpulkan informasi di lapangan dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Dari informasi ini, dilakukan penilaian untuk menentukan lokasi yang layak untuk mendapatkan bantuan program. Kondisi lingkungan wilayah tersebut ditinjau untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria perumahan kumuh. Selanjutnya, mengatur aktivitas dan mengajak orang lain untuk bersosialisasi. Keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dan pemerintah kelurahan diharapkan dapat memahami program KOTAKU dengan benar.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan salah satu narasumber dari tim pelaksana program KOTAKU, diperoleh gambaran mengenai tahapan-tahapan yang direncanakan dalam pelaksanaan program tersebut. Narasumber menjelaskan bahwa tahap awal dari program KOTAKU dimulai dengan proses pengumpulan fakta di lapangan. Hal ini dilakukan

melalui identifikasi kebutuhan masyarakat secara langsung di wilayah sasaran. Proses ini mencakup penilaian menyeluruh untuk memastikan bahwa wilayah tersebut memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan program.

“Tahap pertama yang kami lakukan adalah mengumpulkan fakta di lapangan. Kami melakukan identifikasi langsung terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah sasaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa wilayah tersebut memang layak mendapatkan bantuan dari program KOTAKU”

Narasumber : Danu Umbara Koordinator Program KOTAKU

Salah satu kriteria utama yang dijadikan dasar pemilihan lokasi adalah kondisi lingkungan yang dinilai tidak layak huni dan masuk ke dalam kategori kawasan perumahan kumuh. Berdasarkan hasil identifikasi ini, tim kemudian menentukan jadwal kegiatan untuk pelaksanaan program serta menyusun strategi pelibatan masyarakat. Hal ini dipaparkan oleh narasumber dalam sesi wawancara sebagai berikut :

“Kami menilai kondisi lingkungan dari wilayah tersebut. Apabila lingkungan dinilai tidak layak huni dan termasuk dalam kategori kawasan perumahan kumuh, maka wilayah itu memenuhi kriteria untuk menerima bantuan”

Penetapan lokasi sangat penting saat memilih lokasi untuk permukiman kumuh. Penetapan lokasi didasarkan pada luas permukiman kumuh, jumlah penduduk, kebutuhan akses terhadap infrastruktur dasar, dan layanan dasar, serta komitmen pemerintah daerah untuk menangani permukiman kumuh di perkotaan. Penilaian lokasi dilakukan untuk memastikan kondisi dan permasalahan di kawasan permukiman kumuh. Ini memungkinkan tim

fasilitator menentukan lokasi yang tepat untuk melaksanakan program KOTAKU, sehingga program dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran dan berhasil sesuai yang diharapkan.

“Sosialisasi sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan program. Melalui sosialisasi, masyarakat maupun pemerintah kelurahan bisa memahami secara benar apa itu program KOTAKU, tujuannya, serta bagaimana peran mereka dalam pelaksanaannya. Dengan pemahaman yang baik, partisipasi aktif bisa terbentuk”

Narasumber menekankan pentingnya tahap ini sebagai bagian krusial dalam kesuksesan program. Melalui sosialisasi, diharapkan masyarakat dan pihak pemerintah Kelurahan dapat memperoleh pemahaman yang jelas dan menyeluruh mengenai makna serta tujuan dari program KOTAKU. Dengan pemahaman yang baik, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dapat terbangun, sehingga pelaksanaan program bisa berjalan efektif dan tepat sasaran.

Langkah-langkah tersebut sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George R. Terry “Perencanaan adalah pemilihan fakta dan hubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa depan dengan cara menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan perencanaan program KOTAKU adalah untuk memanfaatkan semua potensi yang ada untuk kebaikan masyarakat.

Dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), salah satu hal utama yang ditekankan adalah pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari tim pelaksana program, diketahui bahwa perencanaan program KOTAKU tidak hanya dilakukan oleh pemerintah semata, tetapi juga melibatkan organisasi masyarakat secara langsung. Masyarakat dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur dengan tujuan menciptakan taraf hidup yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.

“Program KOTAKU memang sangat menekankan partisipasi aktif dari masyarakat. Dalam perencanaannya, organisasi masyarakat dilibatkan langsung, terutama dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Tujuannya bukan hanya membangun fisik, tapi juga meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih baik dari sebelumnya. Perencanaan ini menjadi wadah untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di masyarakat, sehingga program bisa disusun secara lebih komprehensif dan tepat sasaran”.

Narasumber menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting karena dalam pelaksanaan program ini dibutuhkan peran nyata dari semua elemen masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa program KOTAKU bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di lingkungan tersebut. Penyusunan program kerja dilakukan secara kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah, yang diharapkan menghasilkan perencanaan yang komprehensif dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, pelibatan masyarakat dalam perencanaan bertujuan untuk menggali potensi lokal yang dimiliki dan memberikan ruang

partisipasi yang luas. Keterlibatan ini tidak hanya sebatas formalitas, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan prinsip demokrasi dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat menjadi penting agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga yang menjadi objek program yang mencakup seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok miskin.

“Keterlibatan masyarakat dibutuhkan dari awal sampai akhir. Bukan hanya sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi, tapi juga agar hasil pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Yang menjadi sasaran dari program ini adalah seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya masyarakat miskin. Jadi, partisipasi masyarakat harus menyeluruh.”

Sosialisasi menjadi tahap awal yang krusial dalam pelaksanaan program. Melalui sosialisasi, masyarakat diberikan pemahaman yang jelas mengenai maksud dan tujuan dari program KOTAKU. Keberhasilan sosialisasi ini dapat diukur melalui tingkat kehadiran dan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan. Setelah sosialisasi, masyarakat diharapkan mampu mengambil peran aktif dalam mendukung dan mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tujuan utama dari program KOTAKU adalah mengurangi kawasan permukiman kumuh di perkotaan dan memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan untuk mengelola lingkungan mereka secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam pengelolaannya, program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan keswadayaan.

“Salah satunya adalah kehadiran dan keterlibatan aktif dalam kegiatan sosialisasi. Sosialisasi ini penting karena menjadi sarana untuk menyampaikan informasi kebijakan dan rencana kegiatan kepada masyarakat. Dari sana, masyarakat diharapkan bisa memahami dan mendukung kebijakan pemerintah, lalu ikut serta dalam pelaksanaannya. Bentuk lain dari partisipasi adalah gotong royong, keswadayaan, dan kontribusi dalam proses pengambilan Keputusan”

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa keberhasilan program KOTAKU sangat bergantung pada kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya mendukung kelancaran pelaksanaan program, tetapi juga menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang lebih layak, bersih, dan sehat.

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa indikator penilaian terhadap perencanaan Program KOTAKU di Kota Jambi telah terpenuhi di beberapa aspek yakni, Rencana memiliki tujuan yang spesifik, terukur, realistis, dan dapat dicapai. Rencana telah memiliki Langkah operasional sebagaimana indicator penilaian program dan strategi pelaksanaan. Perencanaan juga menyiapkan pemanfaatan sumber daya yang ada dengan baik dengan mengharapkan hasil yang maksimal.

Namun ada beberapa indicator penilaian yang belum terpenuhi dalam perencanaan program KOTAKU di Kota jambi yakni pada indicator alternatif dan Tindakan. Pada perencanaan program KOTAKU di Kota Jambi tidak menyiapkan alernatif Tindakan apabila terjadi kendala pada perencanaan yang tela ada. Efek dari hal tersebut adalah apabila terjadi kendala maka Solusi dari kendala tersebut tidak dapat diperkirakan sejak

awal. Hal ini perlu menjadi koreksi ulang pada perencanaan Program KOTAKU di Kota Jambi.

3.1.2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah cara mengatur pekerjaan dan sumber daya supaya tugas berjalan lancar. Caranya dengan membagi tugas, menentukan siapa yang bertanggung jawab, memberi wewenang, dan mengatur hubungan antarorang atau antarbagian.

Struktur organisasi merupakan susunan hubungan antara setiap bagian dan posisi yang dimiliki sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap komponen di dalam organisasi harus bekerja sama dengan baik untuk mencapai struktur.

Pengorganisasian program KOTAKU meliputi kegiatan menetapkan sumber daya manusia yang dilakukan berdasarkan tugas dan wewenang yang dimiliki masing-masing individu. Pembagian dan pengelompokan program KOTAKU pada masing-masing individu memungkinkan semua bagian dapat bekerja sesuai porsi yang sudah ditetapkan, sehingga setiap bagian dapat bekerja dengan fokus terhadap program yang harus dilakukan.

Dalam upaya menggali informasi mengenai pengorganisasian program KOTAKU, kami melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait, antara lain Lurah, Ketua LKM, serta beberapa warga yang tergabung dalam KSM. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh gambaran

jasas bahwa pengorganisasian program KOTAKU telah berjalan dengan baik, terstruktur, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Menurut Bapak Lurah Telanaipura yang di sampaikan oleh sekretarisnya, pengorganisasian dimulai dengan menentukan struktur pelaksana, mulai dari pembentukan LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) hingga KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Lurah berperan memfasilitasi program sejak tahap awal seperti sosialisasi hingga tahap pengawasan pelaksanaan.

“Kami dari pihak kelurahan memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai arahan dari Dirjen Cipta Karya. Tugas kami adalah memberikan dukungan, memfasilitasi pertemuan warga, dan memastikan masyarakat memahami serta terlibat dalam program ini,” ujar beliau.

Dengan tujuan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur melalui program KOTAKU, kegiatan yang dilakukan selain membentuk kelompok kegiatan, memilih ketua LKM, dan membentuk KSM. Keikutsertaan masyarakat ditentukan berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki masyarakat sehingga keterlibatan masyarakat tersebut dapat meningkatkan hasil pencapaian program.

Pemilihan ketua LKM dan anggota KSM dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Mereka dipilih berdasarkan kepercayaan dan rekam jejak dalam kegiatan pembangunan sebelumnya. Pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, dan setiap kelompok bertanggung jawab atas bagian pembangunan yang dikerjakannya.

Dalam pengorganisasian program KOTAKU, lurah membantu prosesnya mulai dari sosialisasi hingga pengawasan. Kemudian, pada saat penggerakan, LKM bertindak sebagai koordinator, dalam hal ini mengawasi KSM dan anggotanya dalam melakukan pembangunan infrastruktur, dan bertindak sebagai pendamping LKM selama program berlangsung.

Ketua LKM, Ibu Lidia Susanti, menjelaskan bahwa pembentukan KSM dilakukan secara partisipatif dan berdasarkan kompetensi warga.

“Kami mengelompokkan warga ke dalam KSM berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka, misalnya ada yang ahli dalam semenisasi atau pekerjaan saluran air dan didampingi oleh fasilitator. Tujuannya supaya pekerjaan lebih fokus dan hasilnya maksimal,” jelas Ibu Lidia

Pengorganisasian bertujuan untuk pembagian tugas dalam proses program KOTAKU agar lebih tepat sasaran, yang mana dalam pengorganisasian tersebut dilakukan pembagian kelompok KSM. Masing-masing KSM yang akan mengerjakan pembangunan infrastruktur. Pemilihan panitia pelaksana juga sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pemilihan panitia dilakukan melalui pemilihan langsung oleh anggota masyarakat yang dapat dipercaya yang mampu memenuhi tugas yang diberikan. Masing-masing memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. seperti ketua LKM yang telah dipercaya oleh warga untuk waktu yang lama dalam berbagai bentuk pembangunan masyarakat. Dalam hal ini, ketua dan anggota KSM bertanggung jawab atas semua tugas yang dilakukan. Setiap KSM harus membuat laporan, yang kemudian diserahkan kepada

ketua LKM untuk diserahkan kepada fasilitator program KOTAKU. Pengorganisasian masyarakat telah berhasil sejauh ini.

Masing-masing elemen memiliki tugas yang berbeda-beda untuk dilakukan dalam pengorganisasian program KOTAKU ini. Pemerintah kelurahan bertanggung jawab untuk membangun kotanya dengan memberikan dukungan dan jaminan agar program dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah disepakati sebelumnya. Tugas ini didasarkan pada arah kebijakan pembangunan dari dirjen cipta karya. Selain itu, Kelurahan juga mendukung pertemuan masyarakat untuk menyebarkan informasi atau sosialisasi dan melaksanakan program.

Tim pelaksana dan relawan bertugas untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan, mengelola dan melaksanakan kegiatan KOTAKU jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh proses dan membantu menyelesaikan masalah di tingkat kelurahan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang efektif agar program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan koordinasi yang baik, masyarakat dan semua bagian dari program KOTAKU dapat bergerak menuju tujuan bersama.

George R. Terry menyatakan bahwa "Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang (pegawai) terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang

cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pekerjaan mereka, dan pekerjaan mereka, dan pekerjaan mereka, Masyarakat memilih kelompok swadaya masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan penerapan.

3.1.3. Penggerakan (Actuating)

Penggerakan adalah upaya seorang manajer untuk membuat anggota kelompok bersedia dan bersemangat memberikan kontribusi sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, gerakan adalah fungsi pengelolaan yang kompleks dan mencakup banyak hal dan terkait dengan sumber daya manusia. Pembinaan masyarakat adalah langkah pertama menuju pelaksanaan penggerakan. Penggerakan program KOTAKU mencakup memberikan bimbingan dan motivasi, instruksi, nasihat, dan koreksi untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan tetap berjalan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Jambi, ditemukan bahwa proses penggerakan dalam program ini telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sejak awal.

Salah satu narasumber dari tim pelaksana kegiatan menyampaikan bahwa penggerakan merupakan bagian penting dalam proses manajemen program karena berkaitan erat dengan sumber daya manusia. Penggerakan dilakukan dengan cara memberikan pembinaan, bimbingan, motivasi, serta

instruksi yang jelas kepada masyarakat agar program tidak melenceng dari tujuan awal.

“Kita terus memberikan arahan dan juga koreksi bila diperlukan agar masyarakat tetap pada jalur tujuan yang ingin kita capai bersama, yaitu pengurangan kawasan kumuh,” ujar narasumber.

Pelaksanaan Program KOTAKU di Kota Jambi menunjukkan adanya penggerakan yang efektif, yang tercermin melalui berbagai peran penting masyarakat dan tokoh pelaksana di lapangan. Dalam wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak seperti warga yang terlibat langsung, terungkap bagaimana kelima indikator fungsi penggerakan menurut George R. Terry diwujudkan dalam praktik nyata.

Hal serupa juga dikatakan oleh fasilitator program yang menyebut bahwa pendekatan kepemimpinan yang bersifat partisipatif sangat membantu menggerakkan warga tanpa paksaan.

Penggerakan pembangunan merupakan pelaksanaan dari setiap rangkaian yang berkaitan dengan perencanaan program, termasuk mewujudkan visi dan misi masyarakat dan pemerintah melalui peningkatan infrastruktur. Selanjutnya, dokumen perencanaan yang terintegrasi dari perencanaan masyarakat dan kabupaten/kota dibuat. Hasil perencanaan ini menetapkan tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh yang baru.

Dalam proses penggerakan dalam program KOTAKU sudah sesuai dengan perencanaan yang disusun diawal. Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan prioritas penanganan baik skala kota maupun skala

lingkungan yang sudah dikoordinasikan. Dalam hal ini pada dasarnya untuk mewujudkan keberhasilan sebuah program maka penggerakan program bergantung pada peran pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus mampu menciptakan keberhasilan pada program KOTAKU.

Dalam pelaksanaannya, penggerakan ini juga mencakup kegiatan-kegiatan koordinasi seperti rapat rutin yang bertujuan untuk membangun kerja sama tim, menyamakan persepsi, serta memastikan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Seorang tokoh masyarakat menambahkan bahwa dalam setiap pertemuan, masyarakat sangat aktif memberikan masukan, kritik, maupun solusi atas kendala yang dihadapi di lapangan.

“Kami sebagai warga merasa dilibatkan, jadi bukan sekadar penerima manfaat, tetapi juga pelaku dari perubahan itu sendiri,” katanya

Program KOTAKU sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Dalam program KOTAKU, kegiatan rapat bertujuan untuk mengatur pekerjaan, berbagi informasi, meningkatkan kerja tim, dan mencapai tujuan dengan cepat. Karena tentunya setiap daerah memiliki masalah dan cara menyelesaikannya yang berbeda dari satu daerah ke daerah lain, kegiatan ini juga bermanfaat untuk menentukan langkah yang tepat untuk menjalankan program sesuai dengan harapan.

Dalam pelaksanaan program, beberapa kendala di lapangan seperti keterlambatan material, keberatan warga terkait pembebasan lahan, dan cuaca buruk sempat muncul. Namun, tim pelaksana menunjukkan

kemampuan adaptif dan responsif dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

“Kalau ada masalah, langsung dicari jalan keluarnya, misalnya soal lahan warga, diselesaikan secara musyawarah,” kata sekretaris kelurahan

Dalam program KOTAKU, masyarakat yang menjalankan program dan memiliki peran besar dalam membangun wilayahnya. Karena itu, masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam program untuk mendapatkan manfaatnya. Masyarakat harus menyadari bahwa keterlibatan mereka sangat diharapkan. Di Kota Jambi, masyarakat sangat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan, seperti yang ditunjukkan oleh kemauan masyarakat untuk berkolaborasi, tidak hanya dalam bentuk tenaga, tetapi juga dalam bentuk uang, barang, dan informasi yang bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan.

Masyarakat sudah memahami dan menyadari betapa pentingnya mereka terlibat dalam pembangunan program tersebut. Partisipasi masyarakat juga terlihat, karena mereka membantu menyiapkan apa yang dibutuhkan selama proses pembangunan.

Dalam wawancara dengan tokoh pemuda yang aktif sebagai relawan, ia menegaskan bahwa keterlibatan warga bukan semata karena imbalan materi, melainkan karena ingin melihat perubahan di lingkungan mereka.

“Kami kerja ikhlas aja, asal kampung ini bersih, jalannya bagus. Kadang dikasih makan atau air mineral pun udah cukup. Yang penting kita sama-sama bangun kampung,” kata yogi, seorang pemuda relawan.

Dalam proses penggerakan semua sudah berjalan baik hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan yang bisa diselesaikan tepat

pada waktunya hal tersebut dikarenakan adanya dukungan dari pihak yang selalu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk lebih giat lagi dalam bekerja agar keinginan masyarakat untuk memiliki permukiman yang layak huni dapat tercapai dan juga dapat berjalan dengan baik karena kegiatan program KOTAKU dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang dibuat sebelumnya.

3.1.4. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan dalam program KOTAKU adalah proses mengawasi pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan sesuai rencana. Dalam kasus ini, tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa kebijaksanaan yang ditetapkan sesuai dengan semangat kebijaksanaan dan pendekatan yang dimaksud. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia untuk membiayai berbagai kegiatan operasional secara akurat digunakan. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan program KOTAKU berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan pembangunan, diperlukan pengawasan.

Kinerja pelaksanaan program diukur secara objektif berdasarkan laporan kegiatan, dokumentasi pembangunan fisik, dan ketercapaian output yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Tim pelaksana kegiatan seperti KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan fasilitator secara rutin membuat laporan progres pekerjaan yang diverifikasi oleh pihak kelurahan dan pihak pendamping teknis.

Pengawasan program KOTAKU dilakukan secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan. Pengawasan program

KOTAKU membantu mengetahui organisasi masyarakat telah menerapkan program. Setelah itu, untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan. Apa yang dilakukan dalam proses pengawasan program KOTAKU, yaitu menentukan standar fisik agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.

Umpan balik diberikan dalam bentuk diskusi terbuka dan laporan mingguan. Kelurahan memberi masukan kepada tim pelaksana, dan sebaliknya, pelaksana juga dapat menyampaikan kendala kepada fasilitator.

“Kita evaluasi bareng, kalau ada kekurangan disampaikan baik-baik. Karena ini kerja tim, bukan saling menyalahkan,” ungkap LKM kelurahan saat diwawancarai.

Evaluasi ini mendorong perbaikan berkelanjutan dan menjadi bagian dari pembelajaran untuk pelaksanaan program serupa di masa mendatang

Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kinerja pekerja di lapangan. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pengerjaan selama pelaksanaan tugas, kesalahan akan diperbaiki atau diperbaiki untuk mencegah kesalahan tersebut terulang. KOTAKU mempertimbangkan bukti fisik di lapangan dan laporan saat melakukan pengawasan. Program KOTAKU masih diawasi oleh LKM untuk memastikan bahwa masyarakat dapat merawat dan menjaga infrastruktur yang telah dibangun untuk mencegah lingkungan menjadi kumuh.

Dalam proses pengawasan program KOTAKU selalu dilakukan pendampingan dan pemberian penjelasan rutin kepada pekerja agar pengerjaannya dapat berjalan sesuai dengan perencanaan awal. Dalam kasus ini, pengawasan program KOTAKU berjalan secara optimal, yang sesuai dengan teori Reksohadiprojo bahwa pengawasan pada dasarnya

adalah upaya memberikan petunjuk kepada pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai rencana. Sudah jelas bahwa pengawasan adalah kontrol atas operasi organisasi, baik secara institusional maupun individu.

Dalam pelaksanaannya, hasil kerja dibandingkan secara rutin dengan standar teknis dan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini dilakukan oleh fasilitator teknik bersama dengan tim pengelola kegiatan dan aparat kelurahan. Perbandingan ini tidak hanya mencakup aspek fisik (seperti dimensi saluran, kekuatan bangunan, dan estetika), tetapi juga ketepatan waktu pelaksanaan.

“Jika ditemukan adanya penyimpangan seperti keterlambatan atau kualitas pekerjaan yang kurang baik akan dilakukan pembahasan dalam rapat koordinasi untuk mencari solusinya,” ungkap sekretaris kelurahan.

Hal ini menunjukkan adanya mekanisme pembandingan antara target dan hasil aktual, serta respons terhadap penyimpangan tersebut.

Berbagai hasil pembangunan yang sudah tercapai dapat dilihat berhasil atau tidaknya, apabila manfaatnya dapat dirasakan oleh sasaran dan tujuannya tercapai sesuai dengan visi dan misi program. Meskipun keuntungan tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program, namun sudah dapat dianggap efektif. Salah satu keuntungan dari program KOTAKU di Kota Jambi adalah peningkatan akses masyarakat, penurunan jumlah lingkungan kumuh, dan perbaikan jalan di beberapa kelurahan. Diharapkan bahwa hasil dari program

tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat di lingkungan kelurahan yang bertujuan untuk mengurangi lingkungan kumuh, serta masyarakat di sekitarnya.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Program KOTAKU di Kota Jambi

Dalam pelaksanaan setiap program tentunya terdapat factor yang mendukung dan menghambat dalam implementasinya. Tentunya dalam penelitian ini ingin memaparkan kedua factor tersebut guna melengkapi penemuan dalam penelitian ini.

3.2.1. Faktor Pendukung Pengelolaan Program KOTAKU di Kota Jambi

Terdapat 2 Faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan Program KOTAKU di Kota Jambi antara lain: Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia,

1) Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Secara umum tujuan pengembangan sumber daya manusia tentu agar individu, organisasi maupun juga sistem yang ada dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari individu maupun organisasi tersebut. Kalau kita kaitkan dengan program, tentunya mengacutujuan program KOTAKU adalah untuk mendukung pembangunan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan melalui peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan.

Pengembangan sumber daya manusia sangat menekankan bahwa setiap anggota organisasi harus terlibat secara setara dan melakukan diskusi terbuka untuk mencapai konsensus tentang tujuan organisasi. Sebuah proses kapasitas harus mendorong partisipasi dari semua pihak. Pada akhirnya, kebersamaan dalam pengembangan sumber daya manusia juga akan mengevaluasi target capaian yang telah dicapai sebelumnya dan menjadi dasar untuk pengembangan kapasitas yang lebih lanjut. Ini akan memungkinkan kita untuk mengidentifikasi area mana yang perlu diperkuat, hal mana yang harus diprioritaskan, dan bagaimana dan dengan cara apa pencapaian target tersebut dapat dicapai. Dalam hal sumber daya manusia, kualitas pendidikan, sosial, dan ekonomi dapat diukur.

2) Kerjasama Pemerintah Kota dengan Pihak Lain dalam Pencegahan Permukiman kumuh

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah kota dengan swasta sudah berjalan dengan baik dan maksimal, terlihat dari jumlah Kawasan kumuh yang berkurang setiap tahunnya. Meskipun belum sepenuhnya tertangani tetapi pemerintah beserta swasta dan masyarakat akan terus mengupayakan agar Kota Jambi terbebas dari permasalahan tentang permukiman kumuh. Baiknya kerjasama oleh pemerintah dengan pihak lain juga ditunjukkan dengan keterlibatan para Masyarakat dalam pelaksanaan program Kotaku. Proses penyusunan Baseline 100-0-100 di Kota Jambi yang dislaksanakan sejak Tahun 2016, ribuan masyarakat dari berbagai kalangan turut membantu mensukseskan pelaksanaan program tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kerjasama antara pemerintah dengan pihak lain

dalam pencegahan dan pengentasan kawasan kumuh serta adanya komunikasi yang baik.

Komunikasi sangat penting agar semua pihak tahu apa yang akan terjadi saat program penanganan dan pencegahan permukiman kumuh dijalankan. Jika program tersebut berjalan dengan baik, masyarakat akan menikmati manfaatnya, seperti lingkungan yang rapih, bersih, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Jadi, ketika pencegahan permukiman kumuh selesai, masyarakat hanya perlu merawat lingkungannya sendiri.

Dari penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah menyadari perannya sebagai fasilitator bagi masyarakat, dan bahwa masyarakat adalah tumpuan dari program pengentasan permukiman kumuh. Dalam praktiknya, keduanya telah bekerja sama dengan baik untuk memerangi masalah permukiman kumuh. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kontribusi masyarakat dalam berbagai kegiatan atau pelaksanaan program, yang berakibat pada semakin berkurangnya kawasan permukiman kumuh yang ada dari tahun ke tahun.

3.2.2. Faktor Peghambat Pengelolaan Program KOTAKU di Kota Jambi

BADAN KESWADAYAAAN MASYARAKAT (BKM) adalah lembaga pimpinan kolektif masyarakat di tingkat kelurahan yang membantu menangani kemiskinan dan pembangunan permukiman dengan menggabungkan kekuatan dan potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat dan dengan mengakses berbagai sumber daya dari luar.

BKM memainkan peran yang signifikan di tingkat kelurahan dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh KOTAKU. Meskipun demikian, beberapa pengurus BKM masih kurang terlibat. Salah satu kendala dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kota Jambi mungkin adalah kurangnya partisipasi dari kepengurusan BKM. Kurangnya partisipasi disebabkan oleh urusan yang menjadi prioritas bagi masing-masing.

Apabila dikaitkan dengan teori administrasi publik dari Chandler dan Plano menyatakan bahwa administrasi publik sebagai suatu disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, berkenaan dengan pengaturan struktur dan hirarki yang merupakan pembuatan unit, pembagian tugas dan penetapan prosedur, aturan untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam menghadapi hambatan seperti ini, ilmu administrasi publik harus diterapkan untuk mengatasi masalah yang ada di kepengurusan BKM Kota Jambi. Selain itu, diharapkan pengurus BKM tetap mengetahui tentang kemajuan program KOTAKU di Kota Jambi.